

RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MEKAR MULYA, LAMPUNG SELATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENDIDIKAN: ANALISIS PARETO, GAP, *FIVE WHYS*, DAN SWOT

Divo Mi'raj Al-Azis^{1*} dan Zabrina Aprillia RD²

¹Universitas Negeri Malang

²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*E-Mail: divokld21@gmail.com

Abstrak

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan di Desa Mekar Mulya, Lampung Selatan menjadi fenomena sosial yang berpengaruh terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola sekolah. Masyarakat cenderung pasif dalam rapat komite karena minimnya ruang dialog dan keterbatasan informasi yang diterima. Komite sekolah lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap administratif dibanding mitra strategis dalam perencanaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dan merumuskan posisi strategis peningkatannya melalui Analisis Pareto, GAP, *Five Whys*, dan SWOT. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi Desa Mekar Mulya. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik melalui Pareto, GAP, *Five Whys*, dan SWOT untuk mengidentifikasi akar masalah, kesenjangan kondisi, dan strategi peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi bukan hanya disebabkan rendahnya kesadaran warga, tetapi dipengaruhi pola manajemen sekolah yang sentralistik, belum transparan, serta minimnya program pemberdayaan masyarakat. Terdapat kesenjangan besar antara kondisi ideal partisipatif dan praktik lapangan. Namun, potensi penguatan terbuka melalui pemanfaatan komite sekolah, karakter gotong royong masyarakat, dukungan kebijakan nasional, serta media komunikasi digital.

Kata kunci: manajemen pendidikan; analisis pareto; analisis gap; *five whys*; SWOT

Abstract

Low community participation in educational decision-making in Mekar Mulya Village, South Lampung, is a social phenomenon that impacts on transparency, accountability, and the quality of school governance. Community to be passive in committee meetings due to limited space for dialogue and limited information. School committee function more as administrative complements than strategic partners in educational planning. This study aims to analyze the factors causing low community participation and formulate strategic strategies for improving it through Pareto, GAP, Five Whys, and SWOT analysis. The study used a qualitative descriptive approach, located in Mekar Mulya Village. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed thematically using Pareto, GAP, Five Whys, and SWOT analysis to identify root causes, gaps in conditions, and improvement strategies. The results indicated that low participation is not solely due to low community awareness, but also influenced by centralized, non-transparent school management patterns and a lack of community empowerment programs. There is a significant gap between the ideal participatory conditions and field practice. However, potential for strengthening is open through the use of school committees, community mutual cooperation, national policy support, and digital communication media.

Keywords: educational management; pareto analysis; gap analysis; *five whys*; SWOT

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan merupakan salah satu indikator utama terwujudnya tata kelola sekolah yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Keterlibatan masyarakat, terutama orang tua dan komite sekolah, menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan sekolah selaras dengan kebutuhan perkembangan peserta didik serta kondisi sosial budaya setempat. Meskipun demikian, praktik pelibatan publik belum menunjukkan hasil yang memadai di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Mekar Mulya, Kabupaten Lampung Selatan. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut tampak dari minimnya kehadiran warga dalam forum sekolah, terbatasnya kontribusi dalam perencanaan program, serta masih dominannya pola komunikasi satu arah dari sekolah kepada masyarakat.

Data statistik pendidikan memperlihatkan bahwa permasalahan ini berhubungan erat dengan karakteristik demografis masyarakat Lampung Selatan. Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2023 hanya mencapai 7,77 tahun, setara dengan tingkat kelas VIII SMP. Rendahnya capaian pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki pengalaman atau literasi pendidikan yang memadai untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut diperkuat dengan data lain yang menunjukkan bahwa

hanya 3,27 persen penduduk Lampung Selatan yang menempuh pendidikan tinggi pada tahun (Databoks, 2024). Secara sosiologis, hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas sebagian warga dalam memahami peran strategis mereka sebagai mitra sekolah dalam pembangunan pendidikan masih terbatas.

Selain faktor demografis, rendahnya partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan pola manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Masih banyak sekolah yang menerapkan proses pengambilan keputusan secara sentralistik dan bersifat top-down, sehingga ruang partisipasi publik menjadi sempit. Ironisnya, hal ini bertolak belakang dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional yang mengamanatkan komite sekolah sebagai wadah resmi penyaluran aspirasi masyarakat dan mitra sekolah dalam tata kelola institusi pendidikan. Ketidaksesuaian antara kebijakan normatif dan kondisi empirik tersebut menimbulkan kesenjangan (gap) tata kelola yang perlu dikaji lebih mendalam guna menemukan akar permasalahan sekaligus merumuskan strategi perbaikannya.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Desa Mekar Mulya dalam pengambilan keputusan pendidikan melalui penerapan empat pendekatan analitis, yaitu Analisis Pareto, Analisis GAP, Five Whys, dan Analisis SWOT. Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh

gambaran utuh mengenai struktur permasalahan, tingkat kesenjangan antara kondisi ideal dan aktual, serta peluang strategis penguatan partisipasi masyarakat di tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari urgensi perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sekolah yang demokratis dan akuntabel. Rendahnya partisipasi bukan semata-mata akibat kurangnya kemauan masyarakat, melainkan merupakan dampak dari persoalan struktural, kultural, dan manajerial yang saling berkelindan. Melalui pendekatan analitis yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai akar persoalan serta menawarkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih inklusif dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan di Desa Mekar Mulya, Lampung Selatan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu partisipasi masyarakat merupakan fenomena sosial yang sarat makna, dipengaruhi oleh konteks budaya,

hubungan kekuasaan, dan persepsi publik terhadap lembaga pendidikan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara alami, bukan melalui manipulasi variabel, tetapi melalui penafsiran yang mendalam atas berbagai data yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif cocok digunakan untuk mengkaji fenomena yang kompleks, dinamis, dan membutuhkan pemahaman konteks secara holistik (Creswell, 2014).

Penelitian ini memfokuskan pada satu kasus nyata yang sering terjadi di berbagai satuan pendidikan di Indonesia, yaitu minimnya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan pendidikan seperti rapat komite sekolah, musyawarah perencanaan pendidikan, maupun penyusunan program sekolah. Pemilihan masalah tersebut sejalan dengan pendapat Sultoni (2024) dalam buku *Problematisasi Manajemen Pendidikan*, yang menegaskan bahwa salah satu problem manajemen pendidikan yang paling mendasar adalah lemahnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat akibat rendahnya kesadaran, pemahaman, dan akses terhadap proses manajemen pendidikan.

Subjek penelitian melibatkan tiga kelompok utama, yaitu kepala sekolah, komite sekolah, dan perwakilan orang tua. Ketiganya

dianggap memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap kegiatan rapat sekolah, serta telaah dokumen seperti notulen rapat, program kerja komite, dan laporan evaluasi sekolah. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data melalui perbandingan antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik ini sesuai dengan model validitas kualitatif yang disampaikan oleh Moleong (2019), yaitu untuk memperoleh data yang kredibel melalui berbagai sumber dan teknik.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan empat teknik analisis sebagaimana dipaparkan dalam *Problematic Manajemen Pendidikan* (Sultoni, 2024). Pertama, Analisis Pareto digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat dengan prinsip “80/20”, yaitu menemukan beberapa faktor dominan yang paling memengaruhi kondisi tersebut. Kedua, Analisis GAP digunakan untuk membandingkan kondisi ideal partisipasi masyarakat dengan kondisi riil yang terjadi di sekolah, sehingga terlihat kesenjangan antara harapan dan realitas. Ketiga, Analisis Five Whys digunakan untuk menggali akar

penyebab masalah secara lebih mendalam dengan menanyakan “mengapa” secara berulang terhadap fenomena yang muncul. Keempat, Analisis SWOT digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di sekolah.

Seluruh analisis dilakukan menggunakan pendekatan interpretatif. Data yang telah dikategorikan dan direduksi kemudian disusun menjadi narasi analitis yang menjelaskan hubungan antara fenomena yang terjadi, akar penyebab, dan implikasi manajerialnya. Hal ini sesuai dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman (2014), yang menekankan tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode seperti ini, penelitian tidak hanya mampu menjelaskan kondisi empiris terkait rendahnya partisipasi masyarakat, tetapi juga menghasilkan alternatif solusi berbasis analisis manajerial yang komprehensif. Model analisis yang digunakan juga sejalan dengan pendekatan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan modern, di mana proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga evaluasi harus berlandaskan data yang terstruktur dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Mekar Mulya, Lampung Selatan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan masih berada pada kategori rendah. Temuan ini tercermin dari minimnya keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pendidikan di tingkat sekolah. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan kepala sekolah, ketua komite, perangkat desa, serta beberapa orang tua menyatakan bahwa kebanyakan warga cenderung hanya menghadiri rapat sekolah apabila memperoleh undangan secara langsung dan tidak banyak memberikan kontribusi substantif terhadap proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif, administratif, dan belum mencapai tingkat deliberatif yang diamanatkan oleh praktik tata kelola pendidikan partisipatif.

Hasil Analisis Pareto menunjukkan bahwa sekitar delapan puluh persen penyebab rendahnya partisipasi masyarakat bersumber dari dua faktor dominan. Faktor pertama adalah komunikasi sekolah yang belum berlangsung secara efektif, baik dalam penyampaian informasi maupun dalam penyediaan ruang

dialog yang memungkinkan masyarakat mengemukakan pendapat secara terbuka. Proses penyampaian informasi umumnya hanya berbentuk pemberitahuan satu arah melalui surat atau pertemuan singkat, tanpa adanya mekanisme diskusi dua arah untuk menangkap aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif. Faktor kedua adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran strategis mereka dalam pengelolaan sekolah. Banyak warga yang menganggap bahwa urusan sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru, sehingga mereka tidak merasa berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap arah kebijakan sekolah.

Temuan ini diperkuat melalui wawancara dengan salah satu orang tua siswa yang menyatakan bahwa banyak warga merasa tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pendapat, sehingga memilih hanya mengikuti keputusan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Seorang warga menyampaikan:

“Kalau rapat sekolah kami biasanya hanya datang saja untuk dengar. Soalnya kami ini pendidikannya rendah, jadi merasa tidak pantas kalau terlalu banyak bicara. Lagipula kami percaya saja kepala sekolah dan guru pasti lebih tahu,” (Wawancara, Bapak Supranto (Orang Tua Murid SDN 1 Mekar Mulya, 2025).

Pandangan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan masyarakat yang secara umum masih rendah. Fakta statistik menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Lampung Selatan pada tahun 2023 hanya 7,77 tahun, yang setara dengan tingkat pendidikan kelas VIII, sementara penduduk yang menempuh pendidikan tinggi pada 2024 hanya mencapai 3,27 persen. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa keterbatasan literasi pendidikan menjadi salah satu faktor struktural yang memengaruhi kemampuan dan keberanian masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam forum pengambilan keputusan.

Analisis GAP memperkuat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dalam sistem tata kelola pendidikan dan kondisi aktual yang terjadi di Desa Mekar Mulya. Secara normatif, kebijakan pendidikan nasional menuntut terwujudnya tata kelola yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ideal, komite sekolah dan masyarakat harus dilibatkan sejak proses perencanaan program dan penyusunan anggaran, memperoleh akses terhadap informasi yang lengkap, serta memiliki ruang untuk memberikan masukan dalam proses evaluasi pelaksanaan program. Namun,

pada tingkat empirik, partisipasi tersebut belum terwujud secara optimal. Komite sekolah lebih sering terlibat pada tahap akhir sebagai pihak yang menandatangani dokumen administrasi tanpa memiliki andil yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai program sekolah, termasuk anggaran, umumnya disampaikan secara ringkas dan tidak dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat. Di samping itu, warga jarang terlibat dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan maupun dalam evaluasi akhir, sehingga muncul kesenjangan yang cukup lebar antara kerangka ideal dan praktik kelembagaan lokal.

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu anggota komite sekolah yang mengakui bahwa peran komite di Desa Mekar Mulya masih bersifat administratif dan pasif. Dalam wawancara, ia menyatakan:

“Sebagian besar dari kami hanya dipanggil kalau sudah ada berkas yang harus ditandatangani. Soal perencanaan, anggaran, atau keputusan lain biasanya sudah disusun oleh pihak sekolah. Kami sering tidak mendapat penjelasan lengkap, jadi mau memberikan masukan juga bingung karena datanya tidak kami pegang,” (Wawancara, Anggota Komite Sekolah SDN 1 Mekar Mulya, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan adanya keterbatasan akses komite

terhadap informasi strategis serta terbatasnya ruang dialog dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Kondisi ini selanjutnya memperkuat temuan bahwa relasi antara sekolah dan komite lebih bersifat formalitas administratif daripada kemitraan partisipatif yang ideal sebagaimana yang diharapkan dalam tata kelola pendidikan berbasis masyarakat.

Pendalaman melalui Analisis *Five Whys* memperlihatkan bahwa akar permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga, tetapi lebih dipengaruhi oleh mekanisme manajerial sekolah yang masih bersifat sentralistik. Masyarakat sering merasa bahwa kehadiran dan pendapat mereka tidak berdampak signifikan terhadap keputusan sekolah. Perasaan ini muncul karena pengambilan keputusan cenderung dilakukan oleh kepala sekolah atau jajaran internal tanpa melibatkan publik secara bermakna. Sikap tersebut sebagian dipengaruhi oleh pandangan manajerial yang menganggap bahwa masyarakat belum memiliki kapasitas teknis untuk memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sekolah. Sayangnya, kondisi ini tidak diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, seperti pelatihan literasi pendidikan atau sosialisasi

peran komite secara sistematis. Hal ini juga terkonfirmasi melalui wawancara dengan salah satu anggota komite yang menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya ingin terlibat, namun sistem sekolah belum memberikan ruang partisipasi yang kuat. Ia menyampaikan:

“Kalau masyarakat bilang tidak ikut berpendapat, itu bukan karena mereka tidak mau. Tapi rapat sekolah sering kali sudah disusun arah keputusannya. Jadi kami datang hanya diberi penjelasan, bukan diminta memberi masukan sejak awal. Belum ada pelatihan atau pendampingan untuk membuat masyarakat lebih percaya diri berpendapat,” (Wawancara, Anggota Komite Sekolah SDN 1 Mekar Mulya, 2025).

Hal tersebut menguatkan bahwa akar permasalahan bukan hanya pasifnya warga, tetapi ketidaktersediaan mekanisme penguatan kapasitas dan kepercayaan diri masyarakat sebagai bagian integral dalam pengambilan keputusan sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan pola manajemen menuju model yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Analisis SWOT memberikan gambaran lebih luas mengenai posisi strategis penguatan partisipasi masyarakat di Desa Mekar Mulya. Dari sisi kekuatan, sekolah telah memiliki komite sekolah sebagai landasan legal

partisipasi publik dan masyarakat desa memiliki karakter sosial yang kuat dengan tradisi gotong royong. Namun, kelemahan internal masih terlihat terutama pada mekanisme komunikasi yang belum sepenuhnya mendukung dialog dua arah serta rendahnya literasi pendidikan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh komite sekolah yang menyatakan:

“Komite ini sebenarnya bisa menjadi tempat masyarakat ikut menentukan arah sekolah, tapi selama ini komunikasi masih satu arah. Banyak orang tua yang tidak terlalu paham soal anggaran atau program sekolah, jadi mereka tidak tahu apa yang harus ditanyakan,” (Wawancara, Anggota Komite Sekolah SDN 1 Mekar Mulya, 2025).

Di sisi peluang, kebijakan pendidikan nasional telah menempatkan masyarakat sebagai aktor tata kelola pendidikan dan perkembangan teknologi informasi—misalnya grup komunikasi digital—dapat menjadi sarana transparansi serta penyampaian informasi yang lebih terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani yang memiliki keterbatasan waktu hadir di sekolah. Hal ini diperkuat dari pernyataan informan yang menambahkan:

“Mayoritas orang tua bekerja di sawah dari pagi sampai sore. Jadi kalau rapat siang hari, mereka sulit

hadir. Kalau pun datang, kadang hanya sempat mendengar tanpa banyak memberi masukan,” (Wawancara, Anggota Komite Sekolah SDN 1 Mekar Mulya, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain faktor struktural sekolah, kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga menjadi tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang aktif, terutama apabila tata kelola sekolah tidak dikelola secara transparan dan partisipatif secara konsisten.

Untuk menggambarkan pemahaman yang lebih sistematis mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Mekar Mulya dalam mengambil keputusan pendidikan, hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk rangkaian tabel analisis. Setiap tabel mewakili pendekatan analisis yang digunakan, yaitu: Pareto, GAP, *Five Whys*, dan SWOT. Penyajian ini dimaksud untuk memberikan gambaran komprehensif yang memudahkan pembaca memahami struktur permasalahan sekaligus dasar penyusunan strategi pengutan partisipasi masyarakat di tingkat sekolah.

Jenis Analisis	Temuan Utama	Penjelasan Ringkas Berdasarkan Penelitian
Pareto	80% penyebab berasal dari dua faktor dominan: 1) Komunikasi sekolah tidak efektif 2) Rendahnya literasi/kepercayaan diri masyarakat	- Informasi disampaikan satu arah, minim dialog. - Masyarakat tidak merasa tidak pantas berbicara karena tingkat pendidikan rendah.
GAP	Kesenjangan sangat lebar antara kondisi ideal partisipatif dan kondisi aktual di lapangan	- Komite tidak dilibatkan dalam perencanaan, hanya administratif. - Akses informasi terbatas. - Tidak ada pelatihan pemberdayaan.
Five Whys	Akar masalah: manajemen sekolah sentralistik + tidak ada pemberdayaan masyarakat	- Keputusan didominasi pihak sekolah. - Masyarakat tidak percaya diri karena tidak ada pembinaan. - Sekolah tidak

Jenis Analisis	Temuan Utama	Penjelasan Ringkas Berdasarkan Penelitian
		menyediakan mekanisme dialog bermakna.
SWOT — Strengths	Komite sekolah sudah ada; budaya gotong royong kuat	Potensi dasar untuk membangun partisipasi publik.
SWOT — Weaknesses	Komunikasi satu arah; literasi masyarakat rendah; tidak ada pelatihan	Faktor internal sekolah dan keterbatasan kapasitas masyarakat menjadi hambatan utama.
SWOT — Opportunities	Dukungan kebijakan nasional; media digital untuk komunikasi	Ada peluang penguatan jika sekolah membuka akses informasi dan memanfaatkan teknologi.
SWOT — Threats	Pekerjaan warga sebagai petani → waktu terbatas; risiko komite hanya formalitas	Faktor eksternal sosial-ekonomi berpotensi memperburuk rendahnya partisipasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Desa Mekar Mulya dalam pengambilan keputusan pendidikan merupakan akibat dari kombinasi antara faktor struktural, manajerial, dan kultural. Kondisi sosial dan tingkat pendidikan masyarakat memengaruhi kesiapan mereka untuk terlibat, sementara pola pengelolaan sekolah yang sentralistik tidak menyediakan ruang yang cukup untuk pelibatan publik. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan melalui dua bentuk intervensi yang berjalan paralel. Pertama, reformasi tata kelola sekolah melalui penerapan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, penyediaan informasi yang mudah dipahami, serta pemberlakuan prosedur khusus yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus pengambilan keputusan. Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan, pelatihan literasi pendidikan, dan fasilitasi forum diskusi yang memungkinkan warga membangun pemahaman dan kepercayaan diri untuk memainkan peran sebagai subjek dalam tata kelola pendidikan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat

Desa Mekar Mulya dalam pengambilan keputusan pendidikan bukanlah sekadar akibat kurangnya minat atau kesadaran warga, tetapi merupakan hasil dari rangkaian faktor struktural, kultural, dan manajerial yang saling terkait. Berdasarkan Analisis Pareto, lebih dari separuh penyebab rendahnya partisipasi berasal dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya kepercayaan diri dalam forum resmi, dan mekanisme komunikasi yang belum berjalan secara dialogis. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap sikap pasif masyarakat dalam mengikuti rapat komite ataupun kegiatan perencanaan sekolah.

Analisis GAP memperlihatkan adanya jurang yang cukup lebar antara kondisi ideal yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis sekolah, dengan kondisi aktual di mana komite sekolah lebih sering berperan administratif dan tidak menjadi bagian aktif dalam proses perencanaan program maupun penyusunan anggaran. Informasi penting terkait program dan pembiayaan sekolah juga belum disampaikan secara transparan dan mudah dipahami oleh publik, sehingga ruang partisipasi kritis sulit terbentuk.

Melalui Analisis *Five Whys*, akar masalah teridentifikasi pada pola manajemen sekolah yang

masih bersifat sentralistik dan berorientasi pada pengambilan keputusan internal. Masyarakat dianggap belum memiliki kapasitas teknis yang memadai, sementara sekolah belum menyediakan program pemberdayaan seperti pelatihan literasi pendidikan atau pendampingan peran komite. Dengan demikian, masalah utama bukan hanya karena masyarakat pasif, tetapi karena belum adanya mekanisme yang memungkinkan mereka tumbuh sebagai aktor pendidikan yang percaya diri dan kompeten.

Analisis SWOT memperkuat gambaran ini dengan menunjukkan bahwa sekolah sebenarnya memiliki kekuatan dan peluang yang signifikan: keberadaan komite sekolah sebagai dasar legal, tradisi sosial gotong royong, dukungan kebijakan nasional, dan potensi pemanfaatan teknologi informasi. Namun, kelemahan internal seperti komunikasi satu arah dan literasi pendidikan yang rendah, serta tantangan eksternal berupa keterbatasan waktu masyarakat bekerja di sektor pertanian dan rendahnya transparansi berkelanjutan, masih menjadi penghambat utama.

Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat hanya dapat terwujud apabila sekolah mengubah pendekatan pengelolaan menuju pola tata kelola yang lebih inklusif,

partisipatif, dan transparan, serta dibarengi dengan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan penyediaan media komunikasi yang memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R., & Chen, S. (2020). *Community participation and governance in education: Comparative perspectives*. *Journal of Educational Change*, 21(4), 551–569.
- Akhtar, T., & Malik, M. (2021). School–community collaboration and its impact on educational decision-making. *International Journal of Educational Development*, 84, 102430.
- Ariani, N. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 115–130.
- Bafadal, I. (2019). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Boonk, L., Gijssels, H., Ritzen, H., & Brand-Gruwel, S. (2018). A

- review of parental involvement in education and academic achievement. *Educational Research Review*, 24, 10–30. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.02.001>
- Epstein, J. L. (2018). *School, family, and community partnerships: Your handbook for action* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Fitriah, N., & Mulyasa, E. (2021). Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), 45–60.
- Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2019). *How to design and evaluate research in education* (10th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hapsari, L. (2020). Analisis kesenjangan (gap analysis) dalam manajemen partisipasi pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 102–117.
- Ibrahim, A. S., & Wahyuni, S. (2020). Faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(3), 201–214.
- Isaacs, M., & Salinas, P. (2019). Transparency and participation in education governance. *International Journal of Public Administration*, 42(14), 1204–1217.
- Kurniawati, A., & Sari, M. N. (2022). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(1), 89–105.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2020). *Governing education in a complex world*. OECD Publishing.
- Purwanto, E., & Pratiwi, D. (2021). Analisis akar masalah menggunakan metode five whys dalam evaluasi organisasi pendidikan. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 4(2), 133–148.
- Rifai, A. (2021). SWOT analysis in educational management decision-making. *Journal of Educational Management and Leadership*, 3(2), 55–70.

- Sagala, S. (2020). *Manajemen strategik dalam pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, D. P. (2023). Faktor penyebab minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sekolah. *Jurnal Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, 7(1), 49–65
- Suhardan, D. (2019). *Supervisi pendidikan: Teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sultoni. (2024). *Problematic manajemen pendidikan*. Malang: Indocakti Resources.
- Sutrisno, H., & Rohman, A. (2021). Model kolaborasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 10(3), 189–204.
- UNESCO. (2021). *Inclusive governance: Community participation in educational decision-making*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wijaya, H., & Taufik, M. (2020). Implementasi manajemen partisipatif dalam pengelolaan sekolah. *Jurnal Kependidikan*, 22(2), 266–282.
- Wulandari, S. (2022). Analisis pareto dalam identifikasi faktor masalah pendidikan.